



## RAPBD 2019 DISEPAKATI DI AKHIR WAKTU Defisit Belanja Diperkirakan Rp 247 Miliar

YOGYA (KR) - Pembahasan RAPBD 2019 berhasil disepakati Pemkot dan DPRD Kota Yogya pada akhir waktu melalui sidang paripurna, Jumat (30/11) petang. Dari total perencanaan pendapatan daerah sebesar Rp 1,7 triliun, belanja daerahnya mencapai Rp 1,9 triliun sehingga perkiraan defisit sebesar Rp 247 miliar.

"Defisit itu akan ditutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2018 di samping optimalisasi pendapatan. Semua sudah kami petakan bersama dewan. Setelah persetujuan bersama, akan kami sampaikan ke DIY untuk dievaluasi," tandas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Renggono.

Sesuai ketentuan, RAPBD tahun depan harus sudah disepakati paling

lambat satu bulan sebelum masa tahun anggaran berakhir. Dengan begitu, batas maksimalnya ialah 30 November pukul 24.00 WIB. Jika melebihi batas waktu, maka kepala daerah serta anggota dewan terancam tidak mendapatkan gaji selama enam bulan.

Kadri mengaku, ada beberapa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak yang turun. Namun DAU-nya naik signifikan. Kalau secara keseluruhan, dana dari pusat yang dikururkan ke daerah naik Rp 180 juta dibanding tahun 2018," urainya. Selain itu, informasi Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima Pemkot Yogya sekitar Rp 37 miliar, padahal tahun 2018 memperoleh Rp 42 miliar.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya Sujanarko, mengaku sejak awal pembahasan RAPBD 2019, agenda kesep-

akatan atau persetujuan bersama sudah ditetapkan pada 30 November 2018. Kendati dilakukan di akhir waktu, namun tidak ada tahapan yang dilanggar sehingga semua masih dalam batas wajar.

"Sebenarnya tidak ada yang menghambat proses pembahasan. Tapi semua agenda harus disesuaikan waktunya. Yang penting, ketentuannya tetap diikuti," tandasnya.

Terkait fokus belanja daerah, menurut Sujanarko, juga disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Terutama masih fokus pada upaya pengentasan kemiskinan, bidang pendidikan serta pembangunan infrastruktur. Dirinya juga memastikan, komposisi RAPBD 2019 lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005